



Judul Skripsi:

**PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KEUGIAN NEGARA**

(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Nama : Regina Rahma Utami

NIM : 1510611034



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**



**PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA**
**(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA
SELATAN)**

SKRIPSI

REGINA RAHMA UTAMI

1510611034

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL“VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
2019



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN)

REGINA RAHMA UTAMI

1510611034

Skripsi ini telah kami setujui untuk di pertahankan di hadapan Tim
Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 25 Januari 2019

Mengetahui,



Dekan

(Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.)

Kaprodi

(Khoirur Rizal Lutfi,S.H., M.H.)

Pembimbing

(Dr. Agustinus Purnomohadi,SH,MH.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Regina Rahma Utami
NPM : 1510611034
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ketua

(Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH)

Anggota I



(Kayus Kayowuan Lewoleba, SH, MH.)

Dekan

(Dwi Desi Yayı Tarina, S.H., M.H.)

Anggota II

(Dr. Agustinus Purnomohadi, SH,MH.)

Kaprodi

(Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 11 Januari 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi inilah benar hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar :

Nama : Regina Rahma Utami
NPM : 1510611034
Program Studi : Hukum Program Sarjana

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini maka, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 25 Januari 2019



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Regina Rahma Utami
NPM : 1510611034
Fakultas : Hukum
Program Studi : SI Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian
Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Januari 2019

Yang menyatakan,


(Regina Rahma Utami)

**PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI
UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN)**

Regina Rahma Utami

Abstrak

Penyitaan dan Perampasan aset terpidana korupsi adalah langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralih atau hilangnya harta kekayaan dari terpidana korupsi, untuk disita sebagai pengganti kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Permasalahan: Bagaimakah mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai upaya pengembalian kerugian negara dan Bagaimakah upaya untuk memperkuat pengembalian kerugian negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan tambahan informasi serta opini penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan akademisi. Studi ini menghasilkan temuan : mekanisme pelaksanaan penyitaan aset terpidana korupsi berupa; penelusuran aset, pembekuan aset, penyitaan aset, perampasan aset, dan pengelolaan aset. Kemudian upaya untuk memperkuat pengembalian kerugian negara. Saran dalam penelitian ini adalah agar pemerintah meningkatkan fasilitas teknologi untuk dapat menunjang kinerja kejaksaan dalam melakukan penyitaan aset dan eksekutif serta legislatif segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi Undang-Undang.

Kata Kunci : Penyitaan, Aset, Korupsi.

***ADMINISTRATION OF CORRUPTION ACTION ASSETS AS A
STATE RETURN EFFORTS
(CASE STUDY IN SOUTH JAKARTA PROSECUTION SERVICE)***

Regina Rahma Utami

Abstract

Confiscation and seizure of assets of convicted corruption is an anticipatory step that aims to save or prevent the transfer or loss of assets from convicted corruption, to be confiscated as a substitute for state losses due to criminal acts of corruption. Problems: What is the mechanism for the implementation of seizure of assets of corruption convicts by the South Jakarta District Prosecutor's Office as an effort to recover state losses and how to strengthen the state's loss of return. The method used is normative juridical approach to law and additional information and law enforcement opinions from the South Jakarta District Attorney and academics. This study resulted in findings: the mechanism for the implementation of seizure of assets of corruption convicts in the form of; asset tracking, asset freezing, asset seizure, asset seizure, and asset management. Then efforts to strengthen state losses. The suggestions in this study are for the government to improve technology facilities to support the prosecutor's performance in conducting asset seizures and the executive and legislative immediately ratify the draft Criminal Asset Deprivation bill into law.

Keywords : Foreclosure, Assets, Corruption.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Oktober 2018 ini, dengan judul **“Penyitaan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan)”**.

Penulis sangat menyadari bahwapada saat penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari sudut pandang ilmiah maupun tata bahasanya, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak., CPMA., CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
2. Ibu Dwi Desy Yayi Tarina, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi;
3. Bapak Suherman, SH, LLM Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Bapak Subur., S.E., MM Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
5. Bapak Drs. Subakdi, M.M Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. selaku Kaprogdi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi;

7. Bapak Heru Suyanto, SH, MH selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membantu mengarahkan penulis selama kegiatan perkuliahan;
8. Bapak Dr. Agustinus Purnomohadi, SH, MH selaku Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing, memberikan ilmu dan masukan dalam penulisan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Bapak Agoes, SH, MH selaku Jaksa Penuntut Umum Bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selaku narasumber yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat;
11. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH, Bapak Kayus Kayowuan Lewoleba, SH,MH, Bapak Dr. Agustinus Purnomohadi, SH,MH, Bapak Pulton, SH,MH Selaku Dosen Pengaji Sidang Proposal dan Sidang Skripsi.
12. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua dan adik yang telah memberikan doa, dukungan baik secara materi maupun motivasi, serta curahan kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kuliah ini dengan baik.
13. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, atas doa dan dukungannya yang tulus.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan rahmat serta karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 21 Desember 2018

Regina Rahma Utami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
1.6 Metode Penulisan	16
1.7 Sistematika Penulisan	19
2. PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI	
2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	21
2.2 Pengertian Penyitaan dan Perampasan Aset	28
2.2.1 Pengertian Aset	28
2.2.2 Pengertian Penyitaan	30
2.2.3 Pengertian Perampasan	35
2.2.4 Pengertian Perampasan Aset	38
2.3 Perampasan Aset Berdasarkan Hukum Pidana Materiil dan Formil Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	39
2.3.1 Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia <i>(Wetboek van Strafriecht)</i>	39
2.3.2 Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	43
2.3.2.1 Penyitaan Barang Bukti	43
2.3.2.2 Status Barang Bukti Hasil Sitaan Di Dalam Putusan Pengadilan	48
2.3.3 Ketentuan Mengenai Perampasan Aset Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	53
2.3.3.1 Perampasan Aset Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dengan Menggunakan Mekanisme Hukum	

Pidana	54
3. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	
3.1 Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian	63
3.1.1 Perbuatan Melawan Hukum	63
3.1.2 Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian	64
3.1.3 Hubungan Kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian	65
3.2 Berbagai Makna Kerugian	66
3.2.1 Kerugian menurut Hukum Perdata	67
3.2.2 Kerugian menurut Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	67
3.2.3 Kerugian dalam Praktik Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	69
3.3 Kerugian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi	
3.3.1 Kerugian Keuangan Negara yang Telah Berhasil Diselamatkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.....	70
4. ANALISIS PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET OLEH KEJAKSAAN DAN ANALISIS UPAYA YANG PERLU DILAKUKAN DALAM PENYITAAN ASET YANG DAPAT MEMPERKUAT PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA	71
4.1 Penyitaan dan Perampasan Aset oleh Kejaksaan	71
4.1.1 Mekanisme Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi	71
4.1.2 Kendala-Kendala Dalam Melakukan Praktik Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.....	80
4.2 Upaya yang perlu dilakukan dalam penyitaan aset yang dapat memperkuat pengembalian kerugian negara	83
5. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI
REVISI HASIL SIDANG KOMPERHENSIF/SKRIPSI
KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI